JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LOK BANGKAI KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Helwatin Najwa [1], Arpandi [2], Ahmad Baihaqi [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: helwatinnajwa2@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah sebagai masalah lingkungan terus meningkat. Minimnya pemilahan limbah domestik sejak dari sumber, keterbatasan fasilitas penampungan, akumulasi sampah, dan sosialisasi kebijakan pengelolaan yang belum memadai menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan studi ini adalah untuk memahami penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta berbagai faktor yang memengaruhinya. Pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari 15 informan yang ditentukan secara purposive sampling. Reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan menjadi teknik analisis yang diterapkan. Uji kredibilitas dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, membercheck, analisis kasus negatif, dan penggunaan bahan referensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai masih belum berjalan secara maksimal. Dilihat dari beberapa indikator yakni: pertama transmisi kurang optimal karena sosialisasi ke desa belum pernah dilaksanakan secara formal. Kedua kejelasan informasi belum optimal karena penyebarannya belum merata dan tidak terdokumentasi. Ketiga konsistensi belum optimal karena penyampaian infromasi tidak dilakukan secara teratur kepada semua pihak. Keempat ketersediaan sumber daya manusia kurang optimal karena empat petugas sampah tidak sebanding dengan luas wilayah. Kelima ketersediaan sarana dan prasarana kurang optimal karena tempat sampah dan armada masih terbatas dan kerap rusak. Keenam komitmen petugas cukup optimal karena adanya upaya penyediaan sarana prasarana, petugas dan pengangkutan sesuai jadwal meskipun masih ada kendala. Ketujuh tanggung jawab cukup optimal karena petugas menjalankan pengangkutan sampah tetapi respon terhadap penumpukan sampah diluar jadwal masih dinilai lambat oleh masyarakat. Kedelapan koordinasi cukup optimal karena telah terjalin antara Dinas perkim-LH, pemerintah desa, dan petugas sampah. Kesembilan SOP kurang optimal karena belum ada SOP tertulis di tingkat desa. Faktor yang mempengaruhi pertama, faktor pendukung yaitu adanya dukungan dinas terkait dalam menjalankan kebijakan dan adanya kerjasama antara dinas terkait, pemerintah desa dan petugas sampah. Kedua, faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya informasi pengelolaan sampah, keterbatasan anggaran desa, belum ada pedoman tertulis pengelolaan sampah di tingkat desa dan kultur budaya masyarakat yang terbiasa mencampur sampah. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan Dinas perkim-LH meningkatkan frekuensi sosialisasi langsung kepada masyarakat desa dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kepada pemerintah desa menyusun SOP tertulis dan mengalokasikan anggaran untuk menambah fasilitas pengelolaan sampah, petugas sampah lebih sigap dalam menangani penumpukan sampah serta berperan aktif menyampaikan himbauan kepada masyarakat saat pengangkutan, dan masyarakat lebih aktif memilah sampah dari sumbernya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Waste is one of the environmental problems that continues to increase along with population growth and changes in community consumption patterns. This research is motivated by the fact that household waste sorting has not yet been implemented at the source, waste bin facilities remain limited, waste accumulation persists, and socialization of waste management policy is lacking. This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation Number 16 of 2013 on Waste Management in Lok Bangkai Village, Banjang Sub-district, Hulu Sungai Utara Regency, along with the factors that influence it. This study uses a qualitative approach with a descriptive qualitative type. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation with 15 informants selected through purposive sampling. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Credibility tests employed were extension of observation, increasing persistence, triangulation, member checking, negative case analysis, and the use of reference materials. The research results show that the Implementation of Regional Regulation Number 16 of 2013 on Waste Management in Lok Bangkai Village, Banjang Sub-district, Hulu Sungai Utara Regency has not been optimal. This is evident from several indicators: first, transmission is less than optimal because formal socialization to the village has never been carried out. Second, clarity of information is not yet optimal because its dissemination is uneven and undocumented. Third, consistency is not yet optimal because information delivery is not conducted regularly to all parties. Fourth, the availability of human resources is less than optimal because the four waste officers are not proportionate to the size of the area. Fifth, the availability of facilities and infrastructure is less than optimal because waste bins and transport vehicles remain limited and frequently damaged. Sixth, officer commitment is fairly optimal due to efforts to provide facilities, personnel, and scheduled waste collection, despite remaining obstacles. Seventh, responsibility is fairly optimal because officers carry out waste collection, although the community still considers the response to waste accumulation outside the schedule to be slow. Eighth, coordination is fairly optimal, as it has been established among the Perkim-LH Office, the village government, and waste officers. Ninth, standard operating procedures (SOP) are less than optimal because no written SOP exists at the village level. The influencing factors are, first, supporting factors: support from the relevant agency in implementing the policy and cooperation among the relevant agency, village government, and waste officers. Second, inhibiting factors: low public awareness and minimal information on waste management, limited village budget, the absence of written guidelines for waste management at the village level and the cultural habit among the community of mixing waste. Based on these findings, it is recommended that the Perkim-LH Office increase the frequency of direct socialization to the village community and strengthen coordination with the village government; that the village government develop a written SOP and allocate a budget to add waste management facilities; that waste officers be more responsive in handling waste accumulation and play an active role in conveying appeals to the community during waste collection; and that the community be more active in sorting waste at its source.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Regional Regulation*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah menjadi salah satu problem lingkungan yang paling kerap dihadapi di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena isu lingkungan hidup telah menempati posisi strategis dalam agenda pemerintahan. Aktivitas produksi di sektor industri maupun rumah tangga menghasilkan material sisa yang kemudian dibuang dan dikenal sebagai sampah. Setiap tahun volume sampah terus meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk, pergeseran pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan kawasan permukiman yang berlangsung sangat cepat. Berbagai konsekuensi negatif dapat muncul apabila sampah tidak ditangani secara berkelanjutan dan tepat.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Pencemaran lingkungan, penurunan kualitas estetika kawasan, gangguan terhadap kesehatan penduduk, hingga potensi bencana seperti banjir merupakan beberapa dampak yang mungkin timbul.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan utama bagi sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Tanggung jawab pelaksanaannya dipikul secara kolektif oleh pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat. Kewenangan operasional kemudian dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Desa Lok Bangkai sebagai salah satu desa di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara geografis, desa ini berada di kawasan yang dekat dengan aliran sungai, kondisi tersebut menjadikan pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Berdasarkan data Jembatan Timbang, jumlah sampah yang dihasilkan dan terangkut dari Desa Lok Bangkai selama bulan April mencapai 10.430 kg atau sekitar 10,43 ton. Jika dihitung berdasarkan rata-rata mingguan, volume sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 2.607,5 kg per minggu. Dengan jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan dua kali dalam seminggu, maka rata-rata volume sampah yang diangkut dalam setiap kali pengangkutan adalah sekitar 1.303,75 kg atau sekitar 1,30 ton. Meskipun demikian, pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek perilaku masyarakat, sebagian warga masih belum melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Sampah umumnya dikumpulkan dalam satu wadah, dan dibuang tanpa proses pemilahan. Dari sisi sarana dan prasarana, tempat sampah yang disediakan masih terbatas dan belum memadai, serta sistem pengangkutan sampah belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya Desa Lok Bangkai memiliki 4 petugas sampah yang menangani 8 RT, 2 orang bertugas sebagai petugas pengangkut atau pemuat sampah, sedangkan 2 orang lainnya bertugas pengantaran sampah ke TPA. Namun, jumlah petugas tersebut dinilai masih belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah RT yang harus dilayani, sehingga berdampak pada belum maksimalnya pelayanan pengangkutan sampah. Keterbatasan ini menyebabkan masih adanya penumpukan sampah di beberapa titik serta keterlambatan dalam proses pengangkutan. Dalam konteks kebijakan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya pengawasan.

Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti pada saat observasi awal tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut.

Pertama, Pemilahan sampah rumah tangga dari sumbernya belum diterapkan secara optimal. Sebagian besar masyarakat di Desa Lok Bangkai masih mencampur sampah organik dan anorganik dalam satu wadah di rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemilahan sampah dari sumbernya belum diterapkan secara optimal. Berdasarkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, sampah seharusnya dipilah dari sumbernya atau dikelompokan sesuai jenis sampah. Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Desa Lok Bangkai (maret 2026) belum ada pemilahan dari sumbernya. (Sumber:Dokumentasi Peneliti 2026 dan informasi dari petugas sampah)

Kedua, Keterbatasan sarana tempat sampah. Fasilitas tempat sampah di lingkungan desa masih terbatas. Saat ini hanya tersedia satu jenis tempat sampah (tong) untuk setiap wilayah, tanpa pemilahan jenis sampah. Sehingga masyarakat tidak memiliki fasilitas untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Berdasarkan data profil Desa Lok Bangkai, terdapat 25 unit tong sampah yang

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

di distribusikan pada 8 RT Di Desa Lok Bangkai, 1 unit armada pengangkut sampah dan 4 petugas sampah. Jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang efektif. (Sumber:Data profil Desa Lok Bangkai bagian sarana dan prasarana kebersihan)

Ketiga, Terjadinya penumpukan sampah pada tempat sampah. Penumpukan sampah sering terjadi pada tempat sampah hal ini disebabkan karena respons petugas yang kurang cepat dalam menangani penumpukan sampah, ini menunjukan belum optimalnya komitem dan tanggung jawab petugas, serta frekuensi pengangkutan sampah yang perlu ditingkatkan. Keterbatasan armada pengangkut, yaitu 1 unit armada pengangkut sampah untuk melayani 8 RT, juga menjadi penyebab proses pengangkutan sampah tidak berjalan optimal. Selain itu sistem pengelolaan sampah masih menggunakan pola angkut-buang dimana sampah diangkut kemudian langsung dibuang ke TPA tanpa pemilahan lebih lanjut. Kondisi ini mencerminkan belum adanya SOP serta lemahnya koordinasi antar pelaksana. (Sumber:Dokumentasi peneliti dan Data profil Desa Lok Bangkai bagian sarana dan prasarana kebersihan)

Keempat, Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah. Sosialisasi terkait pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai pernah dilakukan, namun kegiatan tersebut sudah berlangsung lama dan hingga saat ini belum terdapat sosialisasi terbaru secara langsung, sosialisasi terbaru hanya ada pembagian stiker pemilahan dari Dinas Perkim-LH. Akibatnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih relatif rendah karena sosialisasi dari pemerintah masih terbatas. (Sumber:Stiker Pemilahan sampah 2026 dari Dinas Perkim-LH).

Melihat fenomena masalah diatas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara".

Penelitian yang dilakukan oleh Fitroni (2018)) berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan (Studi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup)". Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Ilmu Administrasi Publik Minat Perencanaan Pembangunan Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Lamongan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan menjadi fokus utama kajian ini, yang sekaligus menelaah faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui metode analisis deskriptif dengan memanfaatkan model Edward III, mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analitis. Temuan studi mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum mencapai tingkat optimal. Lemahnya sinergi dan koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Lingkungan Hidup menjadi penyebab utama program pengelolaan sampah yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Keterbatasan infrastruktur seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) turut menghambat efektivitas kebijakan ini. Sebagai rekomendasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, pegiat lingkungan, dan LSM dalam pengelolaan sampah. Penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur persampahan juga diusulkan agar sistem pengelolaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2024) berjudul "Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru". Universitas

Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau Jurusan Adminstrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Kajian ini berupaya mengidentifikasi pelaksanaan manajemen persampahan oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus sekaligus menelaah kendala-kendala yang menghambat proses tersebut. Kerangka analisis yang digunakan bertumpu pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang mencakup empat dimensi utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif diterapkan dalam studi ini, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peran Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus dalam mendukung Pemerintah Kota Pekanbaru terlihat nyata melalui upaya penurunan volume sampah serta penguatan kesadaran masyarakat akan urgensi pengelolaan limbah. Temuan studi mengungkapkan bahwa lembaga ini turut menjalankan aktivitas pengolahan dan daur ulang sampah menjadi beragam produk bernilai guna. Tas, keranjang, serta aneka kerajinan berbahan plastik dan kertas merupakan contoh hasil kreasi yang dihasilkan dari proses tersebut. Namun, implementasi program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bank sampah serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah melalui bank sampah sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, sosialisasi yang efektif, serta penguatan sumber daya dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Freadrich dalam Pramono (2020) yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinkan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019) Implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian langkah yang dijalankan oleh individu, pejabat, atau kelompok—baik dari sektor pemerintah maupun swasta—yang difokuskan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Menurut Pressman dalam Mukhtar Mas’ud (2022) Implementasi merupakan sebuah proses interaksi yang menghubungkan rumusan tujuan dengan tindakan yang telah diselaraskan untuk mewujudkannya. Kemampuan untuk membangun keterkaitan dalam rangkaian hubungan sebab-akibat menjadi inti dari proses ini sehingga hasil yang telah direncanakan dapat dicapai.

METODE

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih sebagai metode dalam penelitian ini. Tujuannya adalah memaparkan secara rinci pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai. Dua jenis data, yaitu primer dan sekunder, dikumpulkan melalui teknik tertentu. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan pengukuran mandiri. Sementara itu, data sekunder berkaitan dengan implementasi peraturan tersebut di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan didapatkan dari dokumen yang tersedia di Kantor Desa Lok Bangkai. Subjek yang menjadi sumber data bergantung pada teknik pengumpulan yang digunakan; dalam wawancara misalnya, informan yang memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis berperan sebagai sumber data. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Tujuannya adalah memaparkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai. Dua teknik pengumpulan data digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber melalui angket, observasi, wawancara, serta pengukuran

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

mandiri. Data sekunder berkaitan dengan penerapan peraturan tersebut di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen yang tersedia di Kantor Desa Lok Bangkai. Subjek penghasil data disebut sumber data; jika wawancara menjadi metode pengumpulan data, maka sumbernya adalah informan yang memberikan respons secara lisan maupun tertulis.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara di analisis menggunakan lima dimensi implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III. Setiap dimensi tersebut dijadikan dasar dalam menilai implementasi kebijakan di Desa Lok Bangkai. Adapun dimensi implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III dalam penelitian ini yaitu terdiri dari: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

   Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, tujuan, dan arahan kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat sasaran agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan tepat.

   a. Transmisi

      Penyampaian informasi kebijakan dari pemerintah kepada pelaksana atau masyarakat agar mengetahui tujuan dan pelaksanaan kebijakan.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa transmisi informasi mengenai Perda No. 16 Tahun 2013 di Desa Lok Bangkai termasuk dalam kategori kurang optimal. Meskipun Dinas Perkim-LH telah berupaya melakukan penyebaran informasi melalui berbagai media dan sosialisasi di tingkat kecamatan, namun informasi tersebut belum tersalurkan secara langsung dan menyeluruh kepada masyarakat Desa Lok Bangkai. Sosialisasi langsung ke desa belum pernah dilaksanakan secara formal, petugas sampah tidak dilibatkan sebagai pihak penyampaian informasi, media penyampaian di lapangan sangat terbatas, serta tidak terdapat dokumentasi kegiatan sosialisasi yang memadai di tingkat desa.

   b. Kejelasan Informasi

      Informasi kebijakan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai masih belum optimal. Meskipun pihak dinas dan pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, namun penyebarannya belum merata, tidak didukung media informasi yang memadai di lapangan, dan tidak terdokumentasikan secara terstruktur. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami isi kebijakan secara menyeluruh dan pelaksanaan di lapangan pun belum berjalan secara maksimal.

   c. Konsistensi

      Infromasi kebijakan yang disampaikan harus tetap dan tidak berubah-ubah agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa konsistensi penyampaian informasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya dari pihak dinas maupun aparat desa dalam menyampaikan informasi, namun penyampaian tersebut tidak dilakukan secara teratur, terstruktur, dan menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada masyarakat dan petugas sampah. Sosialisasi khusus sudah lama tidak dilakukan, petugas sampah tidak pernah dilibatkan, dan sebagian besar masyarakat belum pernah menerima informasi secara langsung, sehingga pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat masih sangat terbatas.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah segala kemampuan yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan perlengkapan yang memadai agar implementasi berjalan efektif.

a. Ketersediaan sumber daya manusia

Tersedianya petugas atau pelaksana yang cukup serta memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan dengan baik di desa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai masih kurang optimal. Meskipun telah tersedia empat orang petugas dengan pembagian tugas yang jelas, jumlah tersebut dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah desa yang mencakup delapan RT. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya frekuensi pengangkutan sampah sehingga sampah kerap menumpuk di beberapa titik. Dari sisi kemampuan, para petugas dinilai sudah cukup kompeten dalam menjalankan tugasnya, namun penambahan jumlah petugas tetap diperlukan agar pelayanan pengelolaan sampah dapat menjangkau seluruh wilayah desa secara lebih optimal.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana

Tersedianya fasilitas dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan kebijakan seperti alat, kendaraan, tempat dan lainnya di desa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai masih kurang optimal. Meskipun fasilitas seperti tempat sampah dan armada pengangkut sudah tersedia, jumlahnya masih kurang mencukupi, kondisi armada kerap mengalami kerusakan, dan tempat sampah yang ada belum dilengkapi fasilitas pemilahan. Fasilitas pendukung seperti bank sampah pun belum tersedia. Berbagai kekurangan ini menyebabkan proses pengangkutan dan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap, komitmen, dan karakter pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesediaan melaksanakan kebijakan sesuai aturan.

a. Komitmen petugas/pelaksana

Keseriusan atau kemauan petugas atau pelaksana dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah agar kebijakan dapat terlaksana sesuai tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

komitmen petugas/pelaksana dalam pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai sudah cukup optimal. Pemerintah daerah dan desa telah menunjukkan komitmen melalui penyediaan dasar hukum, sarana prasarana, petugas, serta sosialisasi rutin. Petugas sampah juga telah berupaya menjalankan pengangkutan sesuai jadwal. Namun masih terdapat kendala seperti keterlambatan pengangkutan akibat kerusakan kendaraan dan kurangnya frekuensi pengangkutan saat sampah sudah menumpuk, yang berdampak pada munculnya keluhan dari masyarakat.

b. Tanggung jawab

Sikap petugas atau pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti mengangkut dan menangani sampah sesuai dengan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab petugas sampah di Desa Lok Bangkai masih cukup optimal. Meskipun petugas telah berupaya menjalankan pengangkutan sesuai jadwal dan pemerintah telah menyediakan sarana pendukung seperti TPA, namun respons terhadap penumpukan sampah yang terjadi di luar jadwal masih dinilai lambat oleh masyarakat. Foto penumpukan sampah yang ditemukan di lapangan menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan tanggung jawab petugas belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan organisasi dan tata kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan, termasuk pembagian tugas, wewenang, serta prosedur kerja agar pelaksanaan kebijakan berjalan terarah dan terkoordinasi.

a. Koordinasi

Kerja sama antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk memastikan kebijkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai sudah berjalan cukup optimal. Koordinasi antara pemerintah desa dan petugas sampah terjalin secara langsung dalam menangani kendala di lapangan, sementara Dinas Perkim-LH berperan dalam mendorong sosialisasi dan pengaktifan bank sampah melalui pertemuan-pertemuan desa. Namun demikian, koordinasi antara dinas dan petugas sampah secara langsung masih belum optimal, dan belum terdapat mekanisme koordinasi yang bersifat formal, terjadwal, serta menyeluruh di antara semua pihak yang terlibat. Fasilitas pendukung seperti tempat sampah juga masih dinilai kurang oleh masyarakat, sehingga koordinasi dalam penyediaan sarana pun perlu ditingkatkan.

b. SOP

Pedoman yang digunakan oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas agar pelaksanaan kebijakan berlangsung teratur dan sesuai aturan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan SOP pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai masih kurang optimal. Meskipun kegiatan pengangkutan sampah telah dilaksanakan secara rutin dua kali seminggu, pelaksanaannya belum didasarkan pada SOP tertulis yang baku dan resmi. SOP yang ada hanya bersifat lisan dan terbatas pada jadwal pengangkutan, sementara prosedur pemilahan sampah belum diterapkan secara sistematis. Sosialisasi kepada masyarakat pun

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

masih sangat minim, sehingga sebagian besar warga tidak mengetahui adanya aturan atau jadwal pengelolaan sampah yang berlaku di Desa Lok Bangkai. Kondisi ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai belum dilandasi oleh prosedur kerja yang terstandarisasi dan terstruktur dengan baik.

B. Faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung
   a. Adanya dukungan dinas terkait dalam menjalankan kebijakan

      Berdasarkan gabungan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketiganya menunjukkan gambaran yang konsisten bahwa dukungan dinas terkait merupakan faktor pendukung yang nyata dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai. Wawancara mengungkap komitmen pemerintah daerah, desa, dan petugas sampah dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Observasi memperlihatkan bahwa dukungan tersebut terwujud secara nyata di lapangan, dan dokumentasi memperkuat bukti keseriusan pemerintah melalui regulasi resmi serta fasilitas yang tersedia.

   b. Adanya kerjasama antara dinas terkait, pemerintah desa dan petugas sampah

      Berdasarkan gabungan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketiganya menunjukkan gambaran yang konsisten bahwa adanya kerjasama antara dinas terkait, pemerintah desa dan petugas sampah merupakan faktor pendukung yang nyata dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai. Wawancara mengungkap bahwa kerjasama antar pihak dirasakan manfaatnya oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Observasi memperlihatkan bahwa sinergi tersebut terwujud dalam bentuk pengangkutan sampah yang rutin dan ketersediaan tempat sampah di lingkungan desa. Dokumentasi memperkuat bahwa kerjasama tersebut didukung oleh landasan hukum yang jelas serta bukti fisik fasilitas yang tersedia.

2. Faktor Penghambat
   a. Rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah

      Berdasarkan gabungan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat dilihat bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya penyampaian informasi benar-benar menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah. Minimnya informasi yang diterima masyarakat menyebabkan pemahaman mereka terhadap cara pengelolaan sampah yang baik dan benar masih rendah, sehingga berdampak pula pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

   b. Keterbatasan anggaran desa menyebabkan penambahan fasilitas dan petugas sampah tidak dapat dilakukan

      Berdasarkan gabungan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, keterbatasan anggaran desa terbukti menjadi faktor penghambat dalam penambahan fasilitas dan petugas sampah di Desa Lok Bangkai. Wawancara mengungkap bahwa efisiensi anggaran berdampak langsung pada terbatasnya penyediaan tempat sampah, kendaraan pengangkut, dan jumlah petugas. Observasi memperlihatkan kondisi nyata kekurangan fasilitas di lapangan, dan dokumentasi memperkuat bahwa sarana yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pengelolaan sampah di seluruh wilayah desa.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

c. Belum adanya pedoman tertulis tentang pengelolaan sampah di tingkat desa

Berdasarkan gabungan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketiganya menunjukkan gambaran yang konsisten bahwa belum adanya SOP tertulis merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai. Wawancara mengungkap bahwa aturan yang berlaku hanya bersifat lisan, observasi memperlihatkan pelaksanaan tugas yang kurang terstruktur di lapangan, dan dokumentasi memperkuat ketiadaan prosedur resmi yang dapat dijadikan acuan bersama.

d. Kultur budaya masyarakat yang terbiasa mencampur sampah

Berdasarkan gabungan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat dikatakan bahwa kultur budaya masyarakat yang terbiasa mencampur sampah merupakan hambatan yang cukup signifikan dalam pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai. Ketiadaan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa turut memperkuat kebiasaan lama masyarakat, sehingga upaya pemilahan sampah sejak dari sumber sulit terwujud tanpa adanya intervensi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari empat sub variabel, pertama sub variabel komunikasi terdiri dari tiga indikator, pada indikator transmisi, penyampaian informasi mengenai Perda No. 16 Tahun 2013 di Desa Lok Bangkai termasuk dalam kategori kurang optimal karena sosialisasi langsung ke desa belum pernah dilaksanakan secara formal, petugas sampah tidak dilibatkan sebagai pihak penyampaian informasi, media penyampaian di lapangan sangat terbatas, serta tidak terdapat dokumentasi kegiatan sosialisasi yang memadai di tingkat desa, pada indikator kejelasan informasi hasilnya masih belum optimal karena meskipun pihak dinas dan pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, penyebarannya belum merata, tidak didukung media informasi yang memadai di lapangan, dan tidak terdokumentasikan secara terstruktur sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami isi kebijakan secara menyeluruh, pada indikator konsistensi hasilnya masih belum optimal karena penyampaian informasi tidak dilakukan secara teratur, terstruktur, dan menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada masyarakat dan petugas sampah, sehingga pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat masih sangat terbatas. Kedua sub variabel sumber daya terdiri dari dua indikator, pada indikator ketersediaan sumber daya manusia, hasilnya masih kurang optimal karena meskipun telah tersedia empat orang petugas dengan pembagian tugas yang jelas, jumlah tersebut dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah desa yang mencakup delapan RT, sehingga sampah kerap menumpuk di beberapa titik, pada indikator ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana, hasilnya masih kurang optimal karena meskipun fasilitas seperti tempat sampah dan armada pengangkut sudah tersedia, jumlahnya masih kurang mencukupi, kondisi armada kerap mengalami kerusakan, tempat sampah belum dilengkapi fasilitas pemilahan, dan fasilitas pendukung seperti bank sampah pun belum tersedia, sehingga proses pengangkutan dan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Ketiga sub variabel disposisi terdiri dari dua indikator, pada indikator komitmen petugas/pelaksana cukup optimal karena pemerintah daerah dan desa telah menunjukkan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

komitmen melalui penyediaan dasar hukum, sarana prasarana, petugas, serta sosialisasi rutin, dan petugas sampah juga telah berupaya menjalankan pengangkutan sesuai jadwal, meskipun masih terdapat kendala seperti keterlambatan pengangkutan akibat kerusakan kendaraan dan kurangnya frekuensi pengangkutan saat sampah sudah menumpuk, pada indikator tanggung jawab petugas cukup optimal karena meskipun petugas telah berupaya menjalankan pengangkutan sesuai jadwal dan pemerintah telah menyediakan sarana pendukung seperti TPA, respons terhadap penumpukan sampah yang terjadi di luar jadwal masih dinilai lambat oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan tanggung jawab petugas belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Keempat sub variabel struktur birokrasi terdiri dari dua indikator, pada indikator koordinasi antar pihak, hasilnya sudah berjalan cukup optimal karena koordinasi antara pemerintah desa dan petugas sampah terjalin secara langsung dalam menangani kendala di lapangan, dan Dinas Perkim-LH berperan dalam mendorong sosialisasi dan pengaktifan bank sampah melalui pertemuan-pertemuan desa, meskipun belum ditemukan mekanisme koordinasi yang formal, terjadwal, dan terdokumentasi dengan baik antara seluruh pihak yang terlibat, pada indikator penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur), hasilnya masih kurang optimal karena SOP pengelolaan sampah secara tertulis belum ada dan belum diterapkan di tingkat desa, SOP yang berjalan hanya bersifat lisan dan terbatas pada jadwal pengangkutan, pemilahan sampah belum dilakukan secara sistematis sejak dari sumber, serta sebagian besar warga tidak mengetahui adanya aturan atau jadwal resmi pengelolaan sampah, sehingga pelaksanaan kebijakan di Desa Lok Bangkai belum dilandasi oleh prosedur kerja yang terstandarisasi dan terstruktur dengan baik. Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut. Pertama, faktor pendukung yaitu adanya dukungan dinas terkait dalam menjalankan kebijakan, dan adanya kerjasama antara dinas terkait, pemerintah desa dan petugas sampah. Kedua, faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah, keterbatasan anggaran desa menyebabkan penambahan fasilitas dan petugas sampah tidak dapat dilakukan, belum adanya pedoman tertulis tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dan kultur budaya masyarakat yang terbiasa mencampur sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2019) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Budiman, F.H. (2024) "Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Dikecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru."

Fitroni, T.I. (2018) "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Lamongan."

Mukhtar Mas'ud, B.A. (2022) *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreng Kota Parepare*. Makassar: Citra Multi Persada (CMP).

Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.